



Media: Suara Merdeka

Hari: Kamis

Tanggal: 28 Januari 2021

Halaman: 17

Terdampak PTKM, Buruh dan PKL Mengadu ke Dewan

YOGYAKARTA - Para buruh dan PKL yang tergabung dalam pekerja sektor informal mendatangi DPRD DIY, kemarin. Mereka menyampaikan aspirasi karena selama Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), tidak dapat berusaha secara leluasa. Bahkan ada yang sama sekali tidak membuka usahanya meskipun tidak memperoleh bantuan apapun dari pemerintah.

Salah seorang pelaku usaha kecil, Denta Julian mengungkapkan banyak PKL yang biasanya membuka usaha pada sore hari kewalahan mengatur waktu. Mereka buka pukul 17.00 tetapi harus siap-siap tutup lagi pukul 19.00. Ini menurutnya menjadi kontraproduktif padahal mereka tidak mendapat bantuan dan tidak membebani pemerintah.

"Meskipun penghasilan kami kecil, tetapi tidak masuk skema kemiskinan. Pada pandemi kami juga tidak masuk data padahal pendapatan jauh di bawah rata-rata karena tak boleh jualan atau menyadari karena harus membatasi dan akhirnya banyak yang jatuh miskin, apalagi dengan pembatasan sekarang ini makin membuat PKL miskin," ungkap Julian.

Ia mengatakan kalau memang ada pembatasan harusnya mendapat jaminan hidup sehari-hari karena mereka sama sekali tidak bisa berusaha.

Mereka bisa menerima pembatasan kalau masuk dalam pendataan dan memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari sehingga bisa tenang meskipun tidak membuka usahanya.

Perketat Protokol

Di depan wakil rakyat, ia mengatakan para PKL, buruh, dan pekerja sektor informal tidak mem-

persoalkan ketika ada kebijakan pengetatan bahkan penutupan sekalipun dengan catatan ada jaminan hidup selama penutupan. Mereka yang mencari nafkah di jalanan legawa seandainya ada penutupan selama kebutuhan minimal seperti makan, minum terjamin karena tak bisa bergerak sama sekali.

Ada banyak pelaku usaha kecil yang jatuh miskin selama pandemi, bahkan menjual miliknya yang berharga agar bisa bertahan hidup. Begitu pula para buruh, pekerja sektor informal lain yang jatuh miskin tetapi tidak memperoleh bantuan. Beberapa mengeluh karena yang memperoleh bantuan masih orang-orang yang dulu bahkan yang sudah mampu juga mendapat bantuan.

Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Sofyan SD yang menerima para buruh dan PKL mengatakan dalam pembatasan atau pengetatan untuk menekan angka korban virus corona, harusnya protokol kesehatannya bukan jam buka atau tutup para pedagang. Ia mengambil contoh, pengaturan jam buka justru bisa menimbulkan kerumunan karena orang-orang berebut membeli segala sesuatu dalam waktu yang pendek.

Beda halnya kalau jam buka panjang sehingga orang bisa mengatur waktu agar tidak bertemu dengan orang lain atau berkerumun.

Sekretaris Daerah DIY Kaddarmanta Baskara Aji mengungkapkan dalam perpanjangan PTKM ada perubahan untuk jam buka tempat usaha seperti warung. Pada PTKM pertama lalu waktu buka tempat usaha hanya sampai pukul 19.00 tetapi sekarang pukul 20.00. (D19-58)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005